



Implementasi Faktor Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Banjir (Studi Kasus: Kecamatan Ciledug Kota Tangerang)

Ahmad Sabili Huda Mubarak¹, Ahmad Murodi², Fitria Firdiyani³

^{1,2,3}Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Abstract

Received: 15 November 2023
Revised: 13 Desember 2023
Accepted: 15 Januari 2024

Flood is a seasonal disaster that occurs in Ciledug District, Tangerang City with an average water level of 1-3 meters. Factors such as overflowing Angke River, lack of water catchment areas, drainage that is not functioning optimally, and lack of community participation in protecting the environment affect this. The research was conducted with the aim of knowing the root causes and actions that need to be taken in implementing flood management in Ciledug District, Tangerang City. The research method was carried out in a descriptive-qualitative manner through observation, interviews, and documentation, to then be processed through data triangulation. The results showed that the implementation of the handling of the Regional Disaster Management Agency (UPT BPBD) in Ciledug District was in accordance with the concept of flood management from George Edward III's theory. Shown by a decrease in the number of flood points, a more controlled volume of water, and a shorter duration of water absorption. The community, especially the Tajur sub-district feel the positive effects of this implementation. The concept of flood management can be a guide for the government in improving flood management policies in the future to improve environmental health and community welfare.

Keywords: Policy, UPT BPBD, Flood

(*) Corresponding Author: Sabilihuda@gmail.com

How to Cite: Mubarak, A. S. H., Murodi, A., & Firdiyani, F. (2024). Implementasi Faktor Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Banjir (Studi Kasus: Kecamatan Ciledug Kota Tangerang). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10516283>.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berada pada jalur khatulistiwa yang secara langsung mempengaruhi iklim dan cuacanya. Iklim tropis menjadikan suburnya bumi Indonesia dengan musim penghujan dan musim kemarau. Sejalan dengan berkah yang dimiliki, terdapat ancaman bencana yang perlu dihadapi, pengaruh iklim tropis menjadikan curah hujan di Indonesia cukup tinggi dan rentan terhadap bahaya hidrometeorologi salah satunya banjir.

Banjir didefinisikan sebagai kondisi di mana sungai maupun badan air lain memiliki ketinggian muka air yang berlebih dibandingkan bisanya, dan memungkinkan terjadinya genangan pada beberapa daerah dalam kurun waktu tertentu (Bayuadji, 2022). Akumulasi bencana banjir yang terjadi di Indonesia Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2021) mencapai 501 kali dalam kurun waktu Januari hingga April. Faktor pemicu bencana tersebut adalah tanah longsor, cuaca ekstrem, kurangnya daerah resapan air, drainase yang kurang optimal, serta partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Banjir termasuk ke dalam kategori bencana karena dampaknya yang menimbulkan kerugian dan korban jiwa, serta rusaknya infrastruktur, namun banjir tidak dikatakan bencana jika banjir tersebut tidak merusak ekologi, infrastruktur dan kerugian, banjir semacam ini dapat dilihat pada daerah rawa-rawa, hutan dan daerah yang tidak ada

manusia sebagai penghuninya, bahkan banjir ini akan menumbuhkan ekosistem baru, seperti ikan, tumbuhan dan hewan lainnya. Banjir menjadi bencana jika terjadi di daerah penduduk apalagi padat penduduk dengan dampak kerugiannya. Semakin besar dampak kerugian dan kerusakannya maka semakin besar tingkat bencana tersebut.

Sekalipun telah menjadi masalah klasik yang selalu berulang saat musim penghujan tiba, penanganan banjir umumnya tampak di saat terjadinya banjir dan berhenti saat tidak musim penghujan, sehingga masyarakat dan pemerintah sering lalai di saat tidak musim penghujan, kegiatan dan kebiasaan buruk Kembali terulang di saat musim panas atau musim kemarau seperti, membuang sampah ke bantaran sungai, penutupan gorong-gorong untuk tempat usaha, menutup area resapan air, merusak drainase untuk kepentingan pribadi. Hal ini umum terjadi di daerah-daerah padat penduduk atau daerah perkotaan seperti Kota Tangerang.

Fenomena sejenis ini memerlukan penanganan yang sifatnya berkala sebelum, saat, dan sesudah. Kota Tangerang sebagai salah satu kota terdampak bencana ini dalam penanggulangannya menetapkan Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2016 menetapkan organisasi dan tata kerja pelaksana teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang. Penetapan kebijakan tersebut berkaitan dengan UU No.24/2007 berisi terkait Penanggulangan Bencana, mengatur menyelenggarakan sistem untuk menanggulangi bencana. Dituliskan "badan yang menjadi pelaksana guna penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bertugas menanggulangi bencana lingkup nasional, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas menanggulangi bencana lingkup daerah".

Kecamatan Ciledug berada di dalam Kota Tangerang yang memiliki 4 titik banjir tersebar di beberapa wilayah diantaranya: 1) komplek perumahan Ciledug Indah 1 dan 2, 2) jalan raya Ciledug, 3) Jalan Sudirman timur dan 4) Kampung Tajur. Dampak terparah banjir musiman atau hujan ekstrim yang sering tergenang adalah komplek perumahan Ciledug 1 dan 2, dan di jalan Wahid Hasyim. Berdasarkan hasil pengamatan memiliki empat permasalahan utama pada titik banjir, yakni rusaknya drainase, tertutupnya area resapan air, berkurangnya lahan penampungan air, dan sedimen kali yang terangkat akibat pembuangan sampah sembarangan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan sebuah upaya penanganan yang tepat dan cermat dan menjadi solusi perbaikan di masa mendatang. Berdasarkan hal tersebut, merupakan sebuah urgensi untuk dilakukan penelitian dengan analisis implementasi kebijakan daerah dalam penanganan banjir di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan Pemerintah

Implementasi bermakna kegiatan yang ditentukan individu dan kelompok sipil dalam mencapai sebuah target untuk menciptakan perubahan yang dibebankan oleh keputusan politik (Herabudin, 2016). Sementara itu, Kebijakan adalah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam pemecahan masalah maupun meningkatkan sumber daya baik manusia atau sarana dan prasarana. Selanjutnya istilah "pemerintah" dan "pemerintahan" digunakan untuk menunjukkan subjek atau individu yang memiliki otoritas untuk memerintah atau berdaulat. Sebab kekuasaan berarti kemampuan guna memerintah.

Konsep implementasi dan kebijakan secara utuh dapat dipahami sebagai suatu ketetapan aturan-aturan yang dibuat untuk dilakukan tindakan guna penyelesaian masalah tertentu untuk tercapainya tujuan tertentu dengan melibatkan semua unsur yang terkait dalam aturan-aturan tersebut. Setelah suatu kebijakan dibuat, berbagai tindakan disebut

pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang dibuat tidak berguna tanpa pelaksanaannya. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan sangat penting untuk kebijakan negara. Melalui definisi dan penjelasan yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindak yang dilaksanakan oleh orang yang memerintah kepada orang yang diperintah dalam bentuk aturan/ketetapan/undang-undang untuk dilaksanakan guna menyelesaikan masalah tertentu guna mencapai tujuan tertentu.

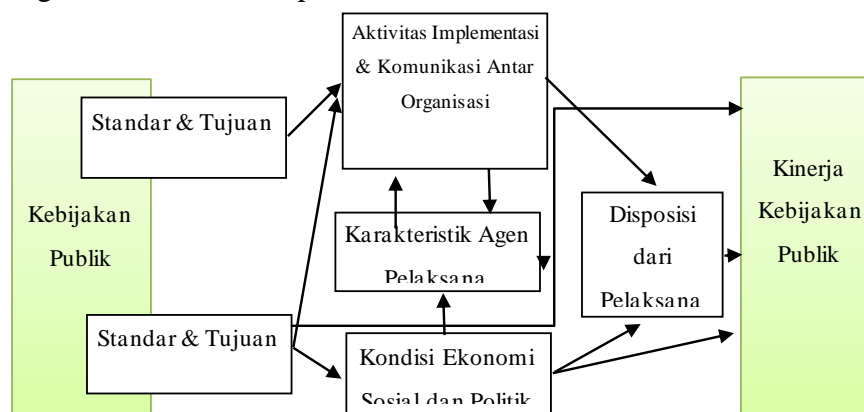
Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pemerintah dapat dirumuskan ke dalam model di mana komponennya mencakup beberapa hal berikut, 1) tiruan realitas, idealisasi dari benda yang tidak nyata, 2) parameter atau perhitungan konstan terhadap standar umum yang digunakan, 3) konsep maupun variabel, 4) hubungan struktur dalam bentuk rumus atau pertanyaan matematis, 5) algoritma atau prosedur wajib dalam pengukuran karakter model dan solusi.

Fungsi dari model adalah membantu pemahaman tentang berjalannya sistem alami dan buatan, mengkaji masalah dengan penyeleksian bagian-bagian krusial dan relevan, memberikan gambaran hubungan antar komponen di dalamnya dan memudahkan penarikan kesimpulan.

Beberapa model implementasi kebijakan publik dikemukakan oleh Donald an Metter dan Carl van Horn serta George C.Edward III.

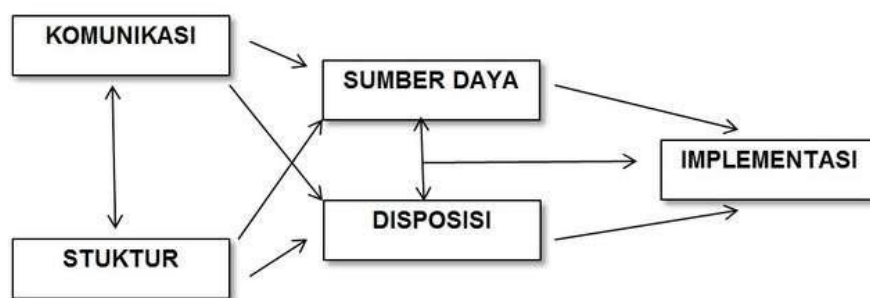
- Model Van Meter dan Van Horn menyatakan keputusan politik, pelaksanaan, dan kinerja kebijakan publik berjalan secara linear. Beberapa variabel berhubungan dalam mempengaruhi kinerja kebijakan yang terdiri dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, ciri khas organisasi, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan sosial-ekonomi-politik.



Gambar 1: Model Pendekatan The Policy Implementation Process (Van Metter & Van Horn)

Sumber: Wahab, Solichin Abdul (2005)

- Model George Edwaard III dikenal sebagai dampak langsung dan tidak langsung dalam implementasi. Dimana terdapat banyak faktor saling berinteraksi dan memmpengaruhi satu sama lain faktor tersebut terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.



Gambar 2: Model Pendekatan Direct and Indirect Impact on Implementation

Sumber: Wahab, Solichin Abdul (2005)

METODOLOGI

Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang didasarkan pada data penelitian yang bersifat empirik dan kasus. Metode penelitian ditempuh dengan tujuan mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang terjadi baik alami maupun rekayasa (Sugiyono, 2019). Melalui metode ini penulis menganalisis, mengeksplorasi, dan menggambarkan fenomena mengenai banjir serta penanganan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Objek dalam penelitian ini berupa sebuah areal yang berlokasi di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Dasar pemilihan objek merujuk pada beberapa pertimbangan, di mana lokasi merupakan perbatasan Tangerang dengan Ibu Kota sehingga sering menjadi sorotan media baik cetak atau elektronik, lokasi merupakan bagian dari kota Tangerang yang memberikan gambaran umum dari kota Tangerang, dan lokasi memiliki akses yang mudah dijangkau sehingga penelitian berjalan secara efektif dan efisien.

Sumber data primer dihimpun melalui wawancara dengan pembuat kebijakan, yakni Walikota Tangerang yang diwakili Kepala BPBD Kota Tangerang, UPT BPBD Kecamatan Ciledug, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Kecamatan Ciledug terdampak banjir (Tabel 1), observasi dan dokumentasi. Sementara data sekunder bersumber dari dokumentasi, dokumen kebijakan, undang-undang, Peraturan Daerah, dan arsip terkait penanganan banjir di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan metode statistik uji validitas dan uji reliabilitas.

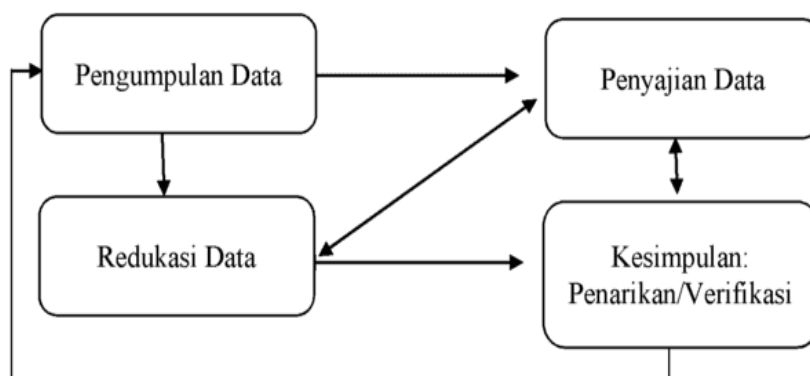
Tabel 1: Informan Penelitian

o	Nama Informan	Inisial	Jabatan/Status
	H. Maryono, AP.MSi	M	Kepala BPBD
	Muhammad Marwan, M,Si	MM	Camat Ciledug
	Ade Juharto, S.Ip	AJ	Kepala UPT BPBD
	Drs. H. Sakri	S	Lurah Tajur
	Drs. Zakarsih	Z	Tokoh Masyarakat
	Ahmad Fendi	F	RW 01 Tajur
	Sugiyanto	S	RT. 02 Padurenan
	Ahmad Sahroni	A	Masyarakat Terdampak Banjir
	Siti Salamah	SS	Masyarakat Terdampak Banjir

0	Sukmajaya	S	Masyarakat Terdampak Banjir
1	Budi Santoso	BS	Anggota UPT BPBD

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Alur analisis data yang dilakukan meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi, dan analisis data kualitatif pada sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data. Proses analisis disajikan dalam **Gambar 3**.



Gambar 3: Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Komunikasi dan Sosialisasi Siaga Bencana Banjir

Strategi kebijakan yang dilaksanakan oleh UPT BPBD Kecamatan Ciledug dalam penanganan bencana banjir adalah sosialisasi terkait program-program dan upaya siap siaga masyarakat dalam menghadapi banjir musiman dan banjir di musim penghujan. Bentuk komunikasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Instruksi kepada Lurah dan Tokoh Masyarakat oleh UPT BPBD terkait siaga banjir. Instruksi disampaikan melalui korespondensi surat menyurat maupun media digital (Instagram, Whatsapp, dan Website resmi BPBD).
- Pemetaan titik banjir untuk menganalisa akar permasalahan dan menemukan solusi penanganan efektif.
- Kunjungan dan pertemuan antar pihak berwenang, dalam hal ini Wali Kota Tangerang dengan masyarakat Ciledug.

Sumber Daya Manusia dan Sarana

Tenaga teknik UPT BPBD Kecamatan Ciledug merupakan anggota yang telah diseleksi berdasarkan rekrutmen Badan Kepegawaian Daerah sebagai pekerja harian lepas dengan jenjang pendidikan minimal SMA atau sederajat. Penempatan dilakukan dengan pertimbangan kompetensi yang dimiliki sehingga mempermudah dalam pengerjaan job desk di lapangan. Upaya peningkatan kompetensi SDM dilakukan melalui kegiatan diklat, workshop, dan bimbingan teknis.



Gambar 4: Anggota UPT BPBD Ciledug

Sumber: Dokumen BPBD Kota Tangerang

Sarana dan prasarana di UPT BPBD Kecamatan Ciledug saat ini terdapat 17 kompa mobiler, 6 perahu pengangkut korban, 70 pelampung, 3 mobil pemadam kebakaran, dan 2 mobil taktis. Penyediaan sarana dan prasarana ini didukung oleh Kecamatan Ciledug yang menyediakan lahan kantor, gudang penyimpanan mobiler, dan inventaris data-data titik banjir.



Gambar 5: Sarana dan Prasarana UPT BPBD Ciledug

Sumber: Dokumen UPT BPBD Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Selatan

Disposisi Anggota UPT BPBD

Pengamatan terhadap disposisi anggota UPT BPBD Kecamatan Ciledug dilakukan karena loyalitas dan tanggung jawab dapat dipengaruhi oleh pengangkatan birokrasi dan insentif anggota. Beberapa aspek terkait birokrasi di UPT BPBD Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:

- Rekrutmen pegawai melalui situs resmi BPBD Kota Tangerang. Seleksi terbuka bagi siapapun dan dilakukan secara *online* maupun *offline*.
- Insentif ditentukan berdasarkan pemerintah daerah bagi ASN, dan berdasarkan upah tenaga harian lepas bagi non ASN. Insentif sudah berada pada taraf UMR dan dilengkapi dengan tunjangan kinerja serta tunjangan kesehatan.

Struktur Birokrasi Penanganan Banjir



Gambar 6: Struktur Organisasi UPT BPBD Kecamatan Ciledug

Sumber: Dokumen UPT BPBD Kecamatan Ciledug

Standar Operasional Prosedur UPT BPBD Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:

1. Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir di Kota Tangerang beserta unsur instansi lembaga / organisasi terkait dilakukan dengan cepat, tepat dan efektif.
2. Melaksanakan tugas operasi penanganan dan penanggulangan banjir selama 7 (tujuh) hari atau dapat diperpanjang sesuai dengan hasil penilaian perkembangan situasi di lapangan
3. Mengkoordinasikan penanganan seluruh korban terdampak untuk dievakuasi
4. Mendistribusikan logistik dengan cepat dan tepat kepada korban
5. Memulihkan sarana-prasarana vital dan kondisi psikis korban.
6. Menjamin kestabilan ekonomi selama masa tanggap dan transisi darurat bencana semua dilaksanakan dengan memberdayakan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki. (*UPT BPBD Kecamatan Ciledug, 8 agustus 2023*)

Penanganan Bencana Banjir di Kecamatan Ciledug

Mitigasi Sebelum Bencana Banjir

Bentuk mitigasi atas penanganan bencana banjir di Kecamatan Ciledug dilakukan melalui sosialisasi masyarakat dan pelatihan ke sekolah maupun masyarakat. Pendataan dan pemetaan titik terjadinya banjir, perbaikan drainase dengan pembuatan tanggul di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), penempatan pompa-pompa portabel, pemeriksaan operasional pompa pada titik banjir, pelaksanaan kerja bakti dalam membersihkan gorong-gorong. Setiap kebijakan ini diikuti oleh seluruh pihak yang dapat berpartisipasi di mana penyampaian informasi diberikan melalui Whatsapp, pamflet, dan laporan hasil pendataan.

Peran pihak terkait antara lain sebagai berikut:

- Kecamatan berperan dalam mengeluarkan regulasi untuk meminimalisir dampak bencana banjir. Melalui himbauan lisan maupun tulisan dan forum-forum warga.
- Kelurahan berperan dalam sosialisasi mengenai pola hidup bersih dan peningkatan kepedulian serta kesadaran masyarakat dalam merawat lingkungannya.
- RT dan RW berperan dalam pengawasan setiap kepala keluarga untuk koordinasi serta memberdayakan petugas lingkungan.

Penanganan Saat Bencana Banjir

Bentuk penanganan saat terjadi bencana banjir terbagi ke dalam beberapa tahap, yang dijelaskan sebagai berikut:

- Pertolongan pertama dengan persiapan tenda darurat, titik pengungsian, dapur umum, mobilisasi warga menuju lokasi pengungsian, air bersih, sarana esehatan dan pendataan korban banjir.

- Melaksanakan pengoperasian pompa-pompa air di titik banjir untuk menanggulangi bencana yang terjadi.

Penanganan Pasca Bencana

Bentuk penanganan pasca bencana berupa pemulihan atau rekonstruksi kembali, baik dari segi kebersihan lingkungan hingga kesejahteraan sosial masyarakat. Dari sisi administrasi, apabila dokumen penting terdampak, dapat langsung mengajukan pada pihak BPN, Polres, dan Dukcapil Kota Tangerang.

Pembahasan

Indikator keberhasilan dari kebijakan pemerintah dalam menanggulangi suatu permasalahan dikemukakan oleh George Edward III terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator ini kemudian menjadi rujukan penulis dalam menganalisa kebijakan pemerintah terhadap penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Ciledug.

Komunikasi

Komunikasi merupakan hal vital dalam penerapan sebuah kebijakan. Komunikasi yang baik memungkinkan adanya transmisi informasi yang berlangsung optimal sehingga dapat diterima dan dijalankan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pemerintahan, komunikasi merupakan aktivitas yang dilakukan sebuah lembaga, dan dirancang untuk menyampaikan keterangan maupun informasi utama atas pemberlakuan sebuah tindakan, legitimasi, maupun menegaskan sanksi sosial (Mulyana, 2021).

Komunikasi yang dilakukan dalam penanganan banjir Kecamatan Ciledug ditempuh berbagai cara lisan maupun tulisan, dan dengan tatap muka maupun media digital disampaikan dalam bentuk sosialisasi dan informasi. Hal serupa dilakukan dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam ranah lain contohnya kebijakan bantuan sosial pasca pandemi COVID-19 yang melibatkan komunikasi antar lembaga (Rahmansyah et al., 2020).

Sementara itu, keberadaan UPT BPBD di Kecamatan Ciledug telah sesuai dengan tujuan dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam PERWAL No 96/2016 mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja pelaksanaan teknis BPBD. UPT BPBD dimaksudkan untuk memudahkan komunikasi, konsolidasi dan koordinasi antara UPT BPBD dan Kecamatan setempat. Komunikasi yang dijalankan secara struktur dan hirarkis memberikan pengalaman efektif bagi pemerintah, UPT BPBD, serta masyarakat.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan perancang, penentu, dan pelaksana dari sebuah kebijakan sehingga kualitas sumber daya secara langsung mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan. Setiap tahapan dari implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya yang berkualitas dan sesuai kompetensinya dengan pekerjaan yang diperintahkan (Gemiharto & Juningsih, 2021). Indikator dari sumber daya meliputi staf, **informasi, wewenang, dan fasilitas.**

Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya di UPT BPBD Kecamatan Ciledug, diberikna pelatihan, diklat, *workshop*, serta bimbingan teknis rutin sehingga pemahaman anggota akan penanganan banjir akan semakin baik dan mendorong implementasinya menjadi lebih efektif. Hal ini juga menjadi upaya minimalisasi miskomunikasi dan miskonsepsi. Dengan kegiatan sebagai berikut, dapat tercapai kesiapan dari infrastruktur dan sumber daya yang mendukung dalam pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan (Pricahyadi & Ramadani, 2019).

Disposisi

Disposisi menggambarkan adanya kecenderungan maupun dorongan dari pelaksana (implementor) dalam menjalankan tugas dalam tingkatan posisi tertentu. Hal yang diperhatikan dalam disposisi adalah adanya pengangkatan jabatan dan insentif yang diberikan (Laary et al., 2022). Disposisi menjadi cukup riskan dikarenakan dapat memberikan efek positif maupun negatif. Menjadi positif ketika keberadaannya mendorong personel dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan hak yang didapatkan, tetapi menjadi negatif ketika hak yang diberikan dirasa kurang dan tidak sejalan dengan pekerjaan sehingga menghambat dalam penyelesaian tugas.

UPT BPBD dalam disposisi yang terjadi memiliki kecenderungan positif berdasarkan wawancara dan informasi yang didapatkan. Pengangkatan birokrasi dan promosi jabatan dilakukan berdasarkan pertimbangan kompetensi dan dedikasi, serta loyalitas dari anggota. Penilaian tentang personel yang berhak mendapatkan disposisi dilakukan secara objektif sehingga tidak menimbulkan tanggapan negatif. Selain itu, insentif bagi anggota UPT BPBD Kecamatan Ciledug yang terdiri dari ASN dan NON ASN (P3K, Tenaga Kontrak, dan Tenaga Lepas) telah disesuaikan jumlahnya dengan berdasar pada BKD/BKN dan UMR. Keamanan dan kenyamanan juga terjamin dengan adanya tunjangan kinerja.

Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan sebuah alat yang dapat dijadikan sebagai batasan hak dan wewenang bagi tiap personel dalam menjalankan tugasnya. Struktur terbentuk dengan konsistensi dan hirarki yang meminimalisir terjadinya miskonsepsi dan human error. Tujuan diberlakukannya birokrasi adalah percepatan tindakan dalam penanganan bencana dan mereduksi dampak negatif yang ada. Dengan adanya birokrasi dalam pemerintahan, sumber daya dapat dimanfaatkan dan dikendalikan secara optimal sehingga menciptakan kemampuan prosedur, mekanisme, dan kapabilitas melayani publik secara strategis (Rustiana & Supriatna, 2021).

UPT BPBD sebagai organisasi resmi yang telah masuk ke dalam Peraturan Walikota Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah memiliki struktur hirarki serta garis komando yang jelas dan terkoordinasi. Hal ini memungkinkan pelaksanaan kebijakan berjalan dalam kontrol dan pengawasan yang baik.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan banjir di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang telah dilakukan dengan baik dengan penetapan Peraturan Wali Kota Nomor 96 Tahun 2016 tentang pembentukan UPT BPBD di setiap Kecamatan. Upaya penanganan yang dilakukan oleh UPT BPBD terbagi ke dalam mitigasi melalui pembinaan, sosialisasi, kerja bakti, dan pengawasan wilayah. Penanganan saat kejadian banjir melalui tanggap darurat penyiapan posko, serta pasca banjir melalui rekonstruksi lingkungan.

Berdasarkan konsep implementasi kebijakan pemerintah George Edward III, implementasi kebijakan penanganan banjir di Kecamatan Ciledug telah berhasil dengan mengacu pada 4 faktor yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang terbangun antar instansi sudah dilaksanakan baik berikut pola restrukturisasi serta jalur komando yang meminimalisir adanya miskomunikasi. Sumber daya yang dimiliki pihak implementor dalam hal ini UPT BBD Kecamatan Ciledug telah cukup dan memiliki anggota loyalis kompeten di bidangnya masing-masing. Disposisi berjalan secara jelas dan objektif sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi para anggota.

Struktur birokrasi menjabarkan tugas dan wewenang pada setiap tingkatan hirarki yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2021). *Bencana Hidrometeorologi*. Bnpb.Go.Id. <https://bnpb.go.id/berita/bencana-hidrometeorologi-dominan-sepanjang-awal-januari-hingga-akhir-april-2021->
- Bayuadji, G. (2022). *Hidrologi dan Peramalan Banjir*. Deepublish.
- Gemiharto, I., & Juningsih, E. R. (2021). Komunikasi pemerintahan dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai di kabupaten Bandung. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jmk.v6i1.35510>
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi Ke Implementasi*. CV. Pustaka Setia.
- Laary, Y., Tulisan, F. M. G., & Dengo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, VIII(120), 60–67.
- Mulyana, D. (2021). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Pricahyadi, M., & Ramadani, T. (2019). Strategi Komunikasi Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 16(1), 112–126. <https://doi.org/10.31113/jia.v16i1.222>
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan COVID 19 di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90–102. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>
- Rustiana, Y., & Supriatna, C. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangannya*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.